

Andi Sulistiyo, Aji Kurniawan, Anindya Satrio Djadi, Ayu Yulia Purnasari, Eko Setyo
Darmo, Firdausy Fauzan, Fred Haryono, Ferya Sughilani, Mubiyono, Munggalan
Santuningsih, Dita Dharmasari, Datta Saptowati, Bambang Ilkudhar, Sri Nurhayati,
Suary Utami Dewi, Tatang Sutrisna



JALAN MENUJU INDONESIA MAJU

*Refleksi 77 Tahun Kemerdekaan Dalam Kepemimpinan
Joko Widodo - Ma'ruf Amin*

Editor:
Abdullah Sumrahadi, Dina Priskasa Yodha, Endi Haryono

JALAN MENUJU INDONESIA MAJU

*Refleksi 77 Tahun Kemerdekaan Dalam Kepemimpinan
Joko Widodo-Ma'ruf Amin*

Editor:

Abdullah Sumrahadi

Dhia Prekasa Yoedha

Endi Haryono

JALAN MENUJU INDONESIA MAJU:
*Refleksi 77 Tahun Kemerdekaan Dalam
Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin*

Katalog Dalam Penerbitan (KDT)

xiv + 267 halaman, 14 x 21 cm
Jakarta, 2021

ISBN : 978-623-95458-7-1

Cetakan Pertama, September 2022

Editor: Abdullah Sumrahardi, Dhia Prekasa Yoedha, dan Endi Haryono

Desain Cover: A Doel Book Project

Layout Isi: Aamaliyah Herdiati

Diterbitkan:

Center for Empowerment, Development and Policy
President University (CEDEP)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar: Jalan Menuju Indonesia Maju: Refleksi 76 Tahun Kemerdekaan dalam Kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin	-v
Menantikan Perubahan Baru di Periode Kedua Mahayoni	-1
Implementasi Kebijakan Netralitas Birokrasi Pemerintah Sebagai Tantangan Menuju Negara Administratif Tatang Sudrajat	-21
Penanganan Terhadap Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Lidya Sophiani	-48
Kearifan Kebijakan dan Pengalaman dalam Menjadi Sehat Pada Era Kenormalan Baru Indonesia	-68

Endang Tirtana

Jokowi dalam Lima Sorotan

Riki Dhamparan Putra

-79

**Tantangan Menegakkan Demokrasi
dan Menanggulangi Pandemi COVID-19**

Sri Nurhayati

-97

Membumikan Diplomasi Indonesia

Saptopo Bambang Ilkodar

-123

Gaya Komunikasi Wong Elite

Tak Sampai ke Wong Cilik

Ayu Yunia Harsari

-147

Indonesia Maju Itu Dekat yang Menjauh

Endi Haryono

-168

Jokowi: Menghormati Oposisi

Mangadar Situmorang

-184

Persoalan Masyarakat Adat: Apakah

yang Perlu Diakui dan Dilindungi Negara?

Swary Utami Dewi

-204

Melawan Radikalisme dan Membumikan

Program Deradikalisasi

Eko Setyo Utomo

-210

Ideologi Dan Teori: -240
Bagaimana Konteks Maupun
Tegangan Adaptasinya Di Indonesia
Andi Saiful Haq

Relasi Agama dan Negara: Pandangan -258
Anak Muda, di Usia 77 Tahun
Indonesia Merdeka
Arkana Danendra Sumrahadi

Membumikan Diplomasi Indonesia

Saptopo Bambang Ilkodar |
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Yogyakarta

Satu frasa yang dapat menggambarkan jalan menuju Indonesia maju dalam politik luar negeri adalah “membumikan diplomasi”. Frasa tersebut mengandung setidaknya tiga makna. Pertama, menjadikan diplomasi sesuatu yang riil, konkrit, dan terukur; bukan sesuatu yang asing dan mengawang-awang. Kedua, membumikan diplomasi Indonesia bermakna menjadikan kegiatan diplomasi sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan kepentingan nasional. Di sini kepentingan nasional diposisikan sebagai titik tujuan; bukan sekadar hasil sampingan. Di sini kepentingan nasional dirumuskan secara eksplisit sehingga langkah-langkah diplomasi menjadi lebih fokus. Di sini bukan lagi mencari citra positif yang keterkaitannya dengan kepentingan nasional kadang terasa jauh dan keuntungannya entah kapan akan dipetik.

Ketiga, membumikan diplomasi Indonesia mengandung semangat untuk menyesuaikan dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perubahan pola hubungan internasional saat ini. Idealisme dalam diplomasi tetap merupakan keharusan tetapi

kebutuhan memperoleh manfaat praktis tak boleh dikesampingkan. Ketika Presiden Donald Trump bersemboyan "America first", Inggris keluar dari Uni Eropa, dan China semakin nyata dominasinya dalam hubungan internasional, maka Indonesia juga harus bersikap dan bertindak secara realistis. Bukan waktunya lagi untuk bermanis-manis dengan pameran "democracy forum" atau sejenisnya. Bukan waktunya lagi berhenti pada kebanggaan sebagai penggagas Gerakan Non Blok atau sebagai pemimpin ASEAN. Kini kebanggaan harus dibarengi dengan kerja nyata dan hasil nyata, baik bagi kepentingan dunia dan lebih-lebih bagi kepentingan nasional Indonesia.

Jalan menuju Indonesia maju dalam politik luar negeri berpangkal pada visi Presiden 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian belandaskan gotong-rotong". Visi tersebut kemudian dituangkan dalam sembilan misi yang sering disebut sebagai Nawa Cita. Urusan politik luar negeri secara implisit tercantum dalam dua misi, yaitu misi "perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga" dan misi "pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih, dan terpercaya".

Visi-misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam urusan politik luar negeri disebutkan bahwa sasaran yang hendak dicapai adalah optimalisasi kebijakan luar negeri. Adapun indikatornya meliputi: pelayanan dan perlindungan warga serta badan hukum Indonesia di luar negeri, kerjasama Selatan-Selatan (sesama negara berkembang), besarnya dana kerjasama pembangunan, partisipasi warga dalam kerjasama internasional, citra internasional Indonesia, dan banyaknya lembaga internasional yang dipimpin oleh Indonesia (Bappenas, 2020: VIII-11).

Kerangka besar sebagaimana tercantum dalam RPJMN itu oleh Menteri Luar Negeri diterjemahkan dalam kebijakan yang disebut Formula 4+1. Kebijakan tersebut meliputi: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan

dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan dan global. Sementara plus satu-nya adalah penguatan infrastruktur diplomasi (Tempo.co, 9 Januari 2020).

Menurut Menlu, dalam kurun tahun 2020-2024 diplomasi ekonomi akan difokuskan untuk menarik investasi yang berkualitas dalam mendukung prioritas pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, penguatan industri hilir, serta pembangunan pulau-pulau terluar dan terdepan. Selanjutnya, untuk penguatan terhadap isu perlindungan akan dilakukan secara holistik baik pada tingkat domestik maupun internasional. Beberapa di antaranya dilakukan dengan Rencana Aksi Nasional dalam rangka implementasi *Global Compact for Migration*, kampanye penyadaran publik mengenai migrasi aman, dan pengembangan ekosistem penggunaan aplikasi *Safe Travel* melalui kerja sama dengan berbagai lembaga penyelenggara perjalanan.

Untuk diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, kementerian luar negeri akan memprioritaskan pada tiga hal yaitu meningkatkan intensitas perundingan untuk batas maritim dan batas darat, melindungi tumpah darah Indonesia, dan terus mengarus-utamakan isu kemajemukan, demokrasi, toleransi, dan pemberdayaan perempuan. Adapun untuk peran Indonesia di kawasan regional ASEAN akan semakin ditingkatkan pada 2020, terutama pada penyelesaian isu Rakhine State. Adapun peran Indonesia pada level global diimplementasikan dalam keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB pada Dewan HAM PBB.

Menurut Menlu, keempat hal di atas hanya akan berhasil secara optimal apabila dibarengi dengan upaya peningkatan infrastruktur, termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Secara keseluruhan implementasinya kerangka besar politik luar negeri Indonesia 2020-2024 ditajamkan dalam tiga Langkah strategis, yaitu: mengangkat Wakil Menteri Luar Negeri dengan tugas khusus bidang ekonomi, memberi bobot lebih besar pada diplomasi bilateral ketimbang multilateral, dan lebih mendahulukan

perolehan substansi ketimbang sekedar reputasi. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

Pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri

Pada 25 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan ditunjuknya Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Presiden menyatakan bahwa Wamenlu diberi tugas khusus untuk mengelola diplomasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan dan investasi (*Kompas.com*, 25/10/2019). Terdapat tiga tugas utama Wamenlu. Pertama, mengambil manfaat dari situasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Kondisi perang dagang kedua negara adidaya itu harus dilihat sebagai peluang, bukan sebagai tantangan. Kedua, mengamankan dan meningkatkan pasar minyak sawit Indonesia. Hal itu sangat strategis mengingat minyak sawit Indonesia saat ini ditekan di sejumlah negara Uni Eropa (UE). Padahal minyak sawit merupakan komoditas penting bagi Indonesia di mana nilai eksportnya merupakan yang terbesar untuk produk non-migas. Ketiga, meningkatkan promosi potensi Indonesia dalam perdagangan global. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mengapitalisasi pasar dalam negeri sebagai instrument politik luar negeri (*Kontan.co.id*, 25/09/2019).

Ketiga tugas utama itu dijabarkan lebih rinci dengan terget yang terukur dan dengan batasan waktu yang juga terukur. Untuk tugas pertama, yaitu mengambil manfaat dari situasi perang dagang, Wamenlu diminta mendorong koordinasi kuat bagi lima industri padat karya berteknologi yang siap mengambil posisi positif di tengah *trade war*. Kelima produk tersebut yaitu tekstil dan produk tekstil, produk karet, sepatu, elektronik dan *home appliances*, serta furnitur. Untuk tugas kedua, yaitu mengamankan pasar minyak sawit, Wamenlu diminta untuk menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit dengan sejumlah langkah, seperti: memperbaiki struktur tata kelola sawit di dalam negeri, mengamankan pasar serta konsumsi dalam negeri, menetralisasi

posisi Uni Eropa yang dinilai tidak bersahabat, menjaga hubungan baik dengan pasar-pasar utama lainnya, serta mengembangkan investasi dan kerjasama di masing-masing pasar tujuan itu. Adapun untuk tujuan ketiga yaitu meningkatkan promosi potensi pasar domestik, Wamenlu diminta mengambil langkah yang tepat terhadap situasi di mana tarif masuk ke negara-negara maju dinilai rendah tapi hambatan non-tarif dari segi standar dan regulasi makin meningkat. Selain itu, saat ini kebijakan melindungi pasar dalam negeri merupakan norma baru dalam hubungan internasional. Kondisi tersebut membuat pendekatan perdagangan melalui prinsip multilateralisme cenderung berkurang, digantikan dengan kesepakatan-kesepakatan bilateral. Dalam kondisi demikian maka pasar besar seperti Indonesia menjadi sangat penting dan harus dimanfaatkan untuk menguntungkan perdagangan dan investasi Indonesia (*Bisnis.com*, 25/09/2019).

Dengan gambaran mengenai tugas Wamenlu yang sangat terang dan rinci sebagaimana diuraikan di atas, terlihat jelas bagaimana Presiden Joko Widodo benar-benar berusaha membuat politik luar negeri Indonesia dilaksanakan demi kepentingan bangsa Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri tidak boleh lagi sekedar menunaikan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Politik luar negeri Indonesia tidak boleh lagi dijalankan sebagaimana biasanya (*business as usual*). Politik luar negeri Indonesia tidak boleh lagi dijalankan sekedar "*anut grubyug*" (sekadar mengikuti kecenderungan yang ada) dalam percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus benar-benar dirancang dengan matang, dijalankan oleh pejabat yang kompeten, dan dilaksanakan secara maksimal sehingga memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Tentu saja amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Amanat tersebut menyatakan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara antara lain "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Lebih dari sekadar melaksanakan kewajiban, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus membuahkan manfaat nyata.

Terbukti bahwa sekarang pola pikir para duta besar telah berubah. Mereka tidak lagi memosisikan diri seolah duduk di menara gading. Tidak lagi berperilaku elitis seolah terpisah jauh dari rakyat yang diwakilinya. Mereka kini bersikap lebih luwes dan proaktif mendekati para pelaku bisnis. Seorang Duta Besar RI di salah satu negara Eropa dalam sebuah kuliah umum mengakui bahwa kini dia disibukkan oleh beragam urusan mulai dari merica hingga ke kusen pintu. Maksudnya, Dubes tersebut kini harus fasih mempromosikan semua komoditas Indonesia agar laku di negara tempatnya bertugas. Seorang Dubes RI untuk salah satu negara Afrika yang baru dilantik pada September 2020 juga menyatakan bahwa dirinya siap memasarkan semua produk Indonesia.

Pengangkatan wakil menteri luar negeri dengan tugas khusus mempromosikan ekonomi bisa dikategorikan sebagai bentuk kebijakan dalam kerangka diplomasi ekonomi. Menurut Kishan S. Rana (2004), diplomasi ekonomi adalah proses bagaimana negara menangani urusan luar negeri, memaksimalkan perolehan dalam semua aktifitasnya, termasuk perdagangan, investasi, dan bentuk-bentuk lain pertukaran ekonomi di mana negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif, dalam semua dimensi baik bilateral, regional maupun multilateral (Pusat P2K OI - BPPK Kementerian Luar Negeri, 2015: 7).

Keberhasilan kinerja diplomasi ekonomi ditentukan oleh lima hal, yaitu: kekuatan ekonomi, lembaga internasional beserta aturan mainnya, kondisi pasar, persaingan kepentingan di dalam negeri, dan cara pandang dalam pengelolaan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekuatan ekonomi adalah kekuatan secara relatif ekonomi suatu negeri dibandingkan dengan ekonomi negara-negara lain di lingkungan regional maupun global. Semakin kuat ekonomi suatu negara maka semakin besar kemungkinan keberhasilan diplomasi

ekonominya. Yang dimaksud lembaga internasional adalah badan-badan dunia seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan lain-lain. Setiap lembaga ekonomi internasional menerpakan aturan main yang berbeda yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya.

Selanjutnya yang dimaksud kondisi pasar adalah kondisi moneter global dan kondisi produksi atau rantai pasok global. Naik turunnya pasar moneter dan naik turunnya produksi versus permintaan barang pada perdagangan global sangat mempengaruhi keberhasilan diplomasi ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan persaingan kepentingan di dalam negeri adalah tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dengan pelaku usaha, antara pelaku dalam bidang satu dengan pelaku pada bidang lain, dan antarlembaga pemerintah. Jika tarik-menarik itu dapat diselesaikan dan keputusan yang harmonis maka peluang keberhasilan diplomasi ekonomi menjadi lebih besar. Terakhir yang dimaksud dengan cara pandang dalam pengelolaan ekonomi adalah cara masing-masing pelaku dalam negeri menyikapi keadaan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan hal keempat di atas, yaitu setiap pihak cenderung hanya mengedepankan kepentingan dan cara pandangannya masing-masing sehingga bisa kontraproduktif terhadap upaya diplomasi ekonomi (Woolcock, 2011 dalam Pusat P2K OI-BPPK Kementerian Luar Negeri, 2015: 8-12).

Dari lima faktor penentu keberhasilan diplomasi ekonomi sebagaimana diuraikan di atas, tiga faktor pertama merupakan faktor eksternal, sedang dua yang terakhir merupakan faktor internal. Penunjukan wakil menteri luar negeri harus dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan dua faktor domestik. Jika persoalan-persoalan domestik bisa segera diselesaikan maka selanjutnya bersiap menghadapi faktor-faktor eksternal. Dari tiga faktor eksternal, dua di antaranya sudah *given*, yaitu faktor kekuatan ekonomi dan faktor lembaga internasional. Tinggallah faktor pasar global yang merupakan ajang perjuangan yang penuh ketidakpastian.

Kekuatan ekonomi Indonesia bisa digolongkan sebagai kekuatan menengah atas jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dan dari keanggotaan Indonesia pada G-20. Lembaga-lembaga internasional berikut aturan main di dalamnya juga sudah merupakan sesuatu yang bersifat ajeg. Maka yang terutama diperlukan adalah mengantisipasi dan menyiapkan diri untuk menghadapi pasar global. Di sinilah peran wakil menteri luar negeri menjadi sangat penting. Di sini pula kejelian Presiden Joko Widodo membaca situasi internasional dan situasi domestik sehingga memutuskan mengangkat seorang wakil menteri luar negeri agar politik luar negeri Indonesia benar-benar membuahkan manfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Penekanan Pada Diplomasi Bilateral

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo politik luar negeri Indonesia lebih menitikberatkan pada diplomasi bilateral. Hal demikian tidak bermakna bahwa diplomasi multilateral tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksudkan adalah bahwa diplomasi bilateral diberikan perhatian lebih besar oleh presiden. Hal itu bisa dilihat antara lain dari kunjungan kenegaraan yang dilakukannya.

Dalam periode kedua pemerintahannya, jumlah kunjungan Presiden Jokowi untuk menghadiri pertemuan multilateral (organisasi regional/internasional) sama dengan jumlah kunjungan yang bersifat bilateral. Presiden Jokowi telah hadir dalam pertemuan ASEAN di Thailand dan pertemuan G-20 di Saudi Arabia (secara virtual). Sedangkan kunjungan yang bersifat bilateral dilakukan ke Uni Emirat Arab dan ke Australia. Hal itu tidak terlepas dari adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan sejumlah agenda ditunda atau dibatalkan.

Apabila perbandingan serupa dilakukan untuk masa pertama pemerintahan maka terlihat sangat jelas bahwa Presiden Joko Widodo lebih banyak melakukan kunjungan yang bersifat bilateral. Lebih dari tiga puluh negara telah dikunjungi dengan beberapa

di antaranya dikunjungi hingga dua atau tiga kali. Sedangkan kunjungan untuk diplomasi multilateral masih sangat sedikit.

Indonesia menjadi anggota dari lebih dari 190 organisasi internasional. Organisasi-organisasi yang pertemuannya dihadiri para kepala negara adalah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Kelompok 20 (G-20), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB) yang kini telah menjadi kerjasama Selatan-Selatan, dan Kelompok Negara Berkembang (D-8). Dari semua organisasi internasional itu Presiden Jokowi hanya menghadiri pertemuan organisasi-organisasi dalam bidang ekonomi, yaitu APEC dan G-20, ditambah ASEAN. Selebihnya sangat jarang dan bahkan ada yang belum pernah dihadiri. Dalam sidang tahunan organisasi tersebut Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk mewakili.

Hal itu menunjukkan kesungguh-sungguhan presiden untuk menjadikan politik luar negeri sebagai bagian dari perjuangan membangun ekonomi nasional. Politik luar negeri harus segaris dan sejalan dengan upaya meningkatkan kemakmuran bangsa. Pelaksanaan politik luar negeri harus benar-benar membuahkan manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kunjungan ke Uni Emirat Arab untuk pertemuan bilateral pada bulan Januari 2020 hal-hal yang dibahas adalah kerja sama ekonomi, khususnya investasi Uni Emirat Arab di Indonesia. Terdapat tiga kesepakatan kerja sama yang ditanda-tangani dalam pertemuan tersebut. Pertama, pembangunan fasilitas pengolahan minyak atau kilang proyek penyulingan (*Refinery Development Master Plan/RDMP*) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua, kerja sama dalam pengembangan industri petrokimia dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA). Ketiga, kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia Maspion di Surabaya, Jawa Timur. Total investasi dari tiga kerja sama tersebut mencapai US\$ 9 miliar atau sekitar Rp 126 triliun (*CNBC Indonesia*, 12/01/2020).

Sementara itu kunjungan Presiden Jokowi ke Australia pada

Februari 2020 dilakukan dalam kaitan selesainya ratifikasi perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*; IA-CEPA), yang akan memperkuat kerja sama perdagangan kedua negara. Dengan telah selesainya ratifikasi IA-CEPA maka dalam lima tahun ke depan kedua negara menyepakati peta jalan yang jelas. Dengan begitu hubungan bilateral khususnya dalam bidang perdagangan akan semakin kuat dan saling menguntungkan. Melalui IA-CEPA akses pasar akan terbuka dan ekspor Indonesia ke Australia bisa semakin meningkat. Sejumlah 6.474 pos tarif atas produk ekspor Indonesia akan menjadi 0 persen pada saat IA-CEPA diimplementasikan dan tidak ada lagi hambatan perdagangan bagi ekspor Indonesia di pasar Australia (ANTARA, 10/02/2020).

Dalam forum multilateral, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tetap dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi Indonesia kembali berhasil menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Seperti diketahui, Dewan Keamanan PBB beranggota 15 negara, yaitu lima negara merupakan anggota tetap dan sepuluh negara merupakan anggota tidak tetap. Negara-negara anggota tetap PBB adalah Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis. Negara-negara itu menjadi anggota Dewan Keamanan sejak lahirnya PBB dan berlaku selama organisasi itu masih ada atau selama aturan dalam Piagam PBB belum diamandemen. Sementara itu sepuluh negara anggota tidak tetap berkesempatan menduduki keanggotaan selama dua tahun. Proses penentuannya dilakukan dengan cara pemilihan.

Indonesia berhasil memenangkan pemilihan untuk wakil dari kawasan Asia Pasifik. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019-2020. Dalam masa keanggotaan itu Indonesia mendapat dua kali kesempatan menjadi Presiden (ketua) Dewan Keamanan, yaitu pada Mei 2019 dan Agustus 2020. Posisi presiden Dewan Keamanan diduduki secara bergiliran di antara negara-negara anggota dewan, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap.

Selama menduduki jabatan Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2020, Indonesia telah banyak mencapai keberhasilan dan oleh karena itu mendapat banyak pujian. Di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB berhasil melaksanakan total 50 kegiatan baik berupa pertemuan tatap muka (luar jaringan; luring) maupun pertemuan virtual (dalam jaringan; daring). Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan Badan Subsider Dewan Keamanan PBB. (kemlu.go.id, 01/09/2020)

Selama masa Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan 4 resolusi, yaitu: (1) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL); (2) resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM); (3) resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali; dan (4) resolusi tentang personel perempuan penjaga perdamaian yang diprakarsai Indonesia. Resolusi mengenai personel perempuan penjaga perdamaian merupakan prestasi tersendiri dalam diplomasi multilateral Indonesia. Resolusi tersebut merupakan usulan Indonesia. Lebih dari sekadar berhasil diwujudkan, usulan resolusi mendapat dukungan 97 negara anggota PBB termasuk keseluruhan 15 anggota Dewan Keamanan. Dukungan sebanyak itu belum pernah terjadi sebelumnya. (kemlu.go.id, 01/09/2020).

Di samping berhasil menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Indonesia juga berhasil menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB. Indonesia berhasil memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung pada Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada tanggal 17 Oktober 2019. Indonesia memperoleh dukungan suara dari 174 negara (dari total 194 negara) sehingga terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Indonesia memperoleh perolehan suara tertinggi untuk kawasan Asia Pasifik dan terpilih bersama tiga negara lainnya dari grup Asia Pasifik, yaitu Jepang dengan perolehan 165 suara, Republik Korea dengan perolehan 165 suara, dan Marshall Islands

dengan perolehan 123 suara. (kemlu.go.id, 18/10/2020).

Dewan HAM PBB merupakan organ PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut. Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota PBB. Sebanyak 13 anggota merupakan perwakilan negara Afrika, 13 anggota merupakan perwakilan Asia Pasifik, 8 anggota merupakan perwakilan negara Amerika Latin dan Karibia, 7 anggota merupakan perwakilan negara Eropa Barat dan negara lainnya, serta 6 anggota merupakan perwakilan kawasan Eropa Timur. Dewan HAM PBB bermarkas di Jenewa, Swiss.

Indonesia sebelumnya telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali yakni periode 2006-2007, periode 2008-2010, periode 2012-2014, dan periode 2015-2017. Ditambah dengan periode sekarang (2020-2022) maka Indonesia sudah lima kali menjadi anggota Dewan HAM PBB; tiga kali dalam masa pemerintah Presiden SBY dan dua kali dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Keberhasilan Indonesia untuk kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota Dewan HAM PBB menunjukkan bahwa kinerja diplomasi multilateral Indonesia dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Lebih dari itu, meskipun arah politik luar negeri terutama untuk kepentingan ekonomi dan penekanannya pada diplomasi bilateral, terbukti diplomasi multilateral tetap dilaksanakan dengan baik. Terbukti bahwa prestasi yang pernah diraih sebelumnya tetap bisa dipertahankan. Artinya, penekanan pada diplomasi ekonomi tidak mengganggu dan tidak mengurangi pencapaian dalam diplomasi dalam bidang lainnya.

Substansi Dulu, Reputasi Kemudian

Paparan di atas menggambarkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pelaksanaan politik luar negeri Indonesia lebih mengedepankan upaya pencapaian substantif

ketimbang reputasi-seremonial. Bukti lain atas hal itu juga bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi dalam sejumlah forum internasional baik multilateral maupun bilateral.

Dalam periode kedua masa pemerintahannya, kebetulan di tengah situasi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo baru dua kali mengikuti pertemuan multilateral dan dua kali melakukan kunjungan dalam rangka hubungan bilateral. Di antara dua pertemuan multilateral itu salah satunya dalam format virtual.

Saat menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Thailand, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara-negara ASEAN untuk menguatkan kerja sama dan bekerja keras melindungi stabilitas dan kesejahteraan di kawasan. Penguatan kerja sama tersebut salah satunya dicapai dengan menindaklanjuti ASEAN Outlook mengenai Indo-Pasifik yang telah disepakati oleh dalam KTT ke-34 ASEAN pada 22 Juni 2019. ASEAN Outlook merupakan cara pandang ASEAN untuk membuat kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan stabil, damai, dan sejahtera. Dalam Outlook tersebut dimuat empat bidang kerja sama, yaitu maritim, konektivitas, Sustainable Development Goals (SDGs), dan kerja sama ekonomi lainnya (kemlu.go.id, 03/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyampaikan gagasannya untuk menggelar "*Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum*" pada 2020. Indonesia berpandangan bahwa peningkatan konektivitas dan infrastruktur di negara-negara ASEAN akan meningkatkan kemakmuran kawasan. Melalui inisiatif tersebut, Indonesia berharap agar pada akhirnya ASEAN dapat terus melaju menjadi lokomotif pengembangan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik (kemlu.go.id, 03/11/2019).

Pernyataan Presiden Jokowi di atas secara spesifik berisi ajakan untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama dalam empat bidang, yaitu maritim, konektivitas, SDGs, dan kerjasama ekonomi secara luas. Ajakan untuk melakukan langkah riil diulai dengan tawaran untuk pembicaraan lebih spesifik mengenai infrastruktur dan konektivitas. Artinya pernyataan Presiden Jokowi bukan

pernyataan normatif dan bukan pernyataan abstrak-mengawang. Pernyataannya sekaligus merupakan tawaran langkah konkret. Inilah bukti upaya pelaksanaan diplomasi yang membumi, yang berfokus pada upaya pencapaian substansi.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam rangkaian KTT ASEAN juga dilangsungkan sejumlah pertemuan lain. Salah satunya adalah KTT ke-22 ASEAN-Cina yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2019. Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pada Juni 2019 ASEAN telah mengesahkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang isinya mendorong seluruh negara di kawasan untuk mengedepankan kolaborasi dan menanggalkan rivalitas. Terkait hal itu Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN terbuka untuk bekerja sama dengan RRT, yang salah satunya memfokuskan pada kerja sama konektivitas dan infrastruktur. Kerjasama semacam itu merupakan kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu Presiden Jokowi berharap sinergi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025 dan *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi sebuah keniscayaan. Menurut Presiden Jokowi, pengembangan konektivitas dan infrastruktur sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru di Kawasan Indo-Pasifik (setneg.go.id; 03/11/2019).

Pernyataan di atas juga berisi ajakan untuk sesegera mungkin mengimplementasikan kesepakatan. Lebih dari itu, Presiden Jokowi langsung menawarkan kerjasama dengan China untuk mendukung implementasi kesepakatan ASEAN. Tawaran disampaikan karena China mempunyai potensi besar dan saat ini juga sedang membangun konektivitas menghidupkan Kembali jalur sutera.

Dalam forum multilateral yang lain, yaitu pertemuan G20 yang diselenggarakan secara virtual pada 26 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin untuk bersama-sama memenangkan dua "peperangan" yaitu melawan virus corona (Covid-19) dan pelemahan ekonomi dunia. Menurut Presiden Jokowi, G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam

penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi tersebut jangan sampai mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, G20 harus aktif memimpin upaya menemukan anti-virus dan obat Covid-19, tentunya bersama WHO.

Presiden Jokowi juga mendorong negara anggota G20 untuk bekerja sama serta menyinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19. Semua pihak harus mencegah resesi ekonomi global melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi serta memperluas dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, Presiden Jokowi mendorong G20 untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk menjaga ketersediaan likuiditas dan memberikan relaksasi serta dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19. Presiden juga menyampaikan pentingnya negara-negara anggota G20 untuk mencegah disrupti produksi dan menjaga kelancaran distribusi barang, utamanya bahan pangan pokok dan barang kesehatan (setkab.go.id; 26/03/2020).

Dalam forum yang diikuti para kepala pemerintahan dari negara-negara maju itu Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan yang bukan hanya sesuai dengan situasi dan kondisi dunia, melainkan juga berupa ajakan untuk mengambil langkah konkrit. Tidak seperti kebanyakan kepala pemerintahan yang sering menyampaikan pernyataan mengawang-awang, Presiden Jokowi selalu menyampaikan hal yang bersifat konkrit untuk segera ditindaklanjuti. Selalu menyampaikan pernyataan yang mengarah ke pencapaian substansi, bukan puas hanya dengan gemuruh tepuk tangan dalam sesi seremonial.

Sementara itu, kunjungan kenegaraan yang bersifat bilateral dilakukan oleh Presiden Jokowi antara lain ke Uni Emirat Arab. Pada kunjungan ke negara tersebut Presiden Jokowi menyampaikan pidato kunci (*keynote speech*) dalam forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) pada 13 Januari 2020. Dalam

pidato tersebut Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia turut berperan dalam membentuk energi masa depan yang terbarukan. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia turut berkontribusi membentuk energi masa depan khususnya dalam bidang penyimpanan energi. Nikel merupakan salah satu unsur penting pada sebuah baterai lithium ion, di mana baterai tersebut digunakan pada ponsel pintar. Selain pada ponsel, baterai lithium ion juga diperlukan sebagai salah satu komponen kelistrikan pada sistem transportasi semisal mobil listrik. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia siap untuk mensuplai kebutuhan dunia akan industri baterai lithium ion yang tumbuh dengan cepat. Presiden Jokowi mengundang semua pihak untuk bermitra membangun industri di dalam negeri untuk memproduksi komponen baterai sebagai perpanjangan hilir alami dari produksi nikel (setneg.go.id; 14/01/2020).

Menurut Presiden Jokowi, sektor lain di mana Indonesia berperan penting dalam pembentukan energi masa depan adalah terkait bahan bakar terbarukan B-20 dan B-30. Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak kelapa sawit merupakan bahan utama untuk produksi biodiesel. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa Indonesia telah meluncurkan program B-30 yang akan lebih menghemat anggaran impor bahan bakar dan lebih menurunkan lagi emisi gas rumah kaca. Presiden menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus merestrukturisasi sistem energinya sehingga memenuhi prinsip kelestarian lingkungan (setneg.go.id; 14/01/2020).

Isi pidato Presiden Jokowi bukan hanya bersifat konkrit dan implementatif. Lebih dari itu, Presiden secara eksplisit menunjukkan produk tertentu untuk dikerjasamakan. Artinya, Presiden benar-benar mengharapkan hasil substantif dan konkrit dari kegiatan diplomasinya.

Satu kunjungan bilateral lain dilakukan Presiden Jokowi ke Australia. Dalam kunjungan tersebut Presiden menyampaikan pidato di Parlemen Australia pada 10 Februari 2020. Presiden

menyampaikan dalam pidatonya antara lain bahwa tujuh puluh tahun kemitraan Indonesia dan Australia harus terus dijaga dan diperkokoh. Bersamaan dengan itu, kedua negara harus mempersiapkan diri agar kemitraan 100 tahun Indonesia dan Australia, yaitu tiga dekade mendatang, dapat terwujud. Tidak hanya kemitraan antarpemerintah dan parlemen, melainkan juga antara rakyat kedua negara. Namun Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa dunia diprediksi akan semakin dipenuhi dengan ketidakpastian. Apabila tren yang ada saat ini terus berlanjut maka dunia tiga dekade mendatang akan menjadi terdisrupsi, situasi geopolitik dan geoekonomi dunia semakin berat, stagnasi bahkan resesi ekonomi dunia sulit dihindari. Dikhawatirkan nilai demokrasi dan kemajemukan akan termarginalkan. Oleh karena itu, menurut Presiden, di tengah berbagai tantangan tersebut Indonesia dan Australia harus fokus pada upaya peningkatan kemitraan (setneg.go.id; 11/02/2020).

Isi pidato di Parlemen Australia tersebut memang tidak bersifat konkrit dan tidak pula spesifik. Sangat dimungkinkan hal itu dilakukan karena forumnya memang forum legislatif, bukan forum eksekutif. Sekalipun demikian, tujuan utama kunjungan Presiden Jokowi ke Australia adalah untuk menyempurnakan langkah setelah kesepakatan tentang perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia diratifikasi oleh kedua pihak. Artinya kerangka besar kunjungan kenegaraan tersebut adalah untuk mengawali langkah realisasi atas kesepakatan dalam bidang ekonomi.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keempat kunjungan kenegaraan sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas arahnya adalah rencana aksi dan implementasi. Muaranya adalah peningkatan kerjasama ekonomi untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Itulah diplomasi yang membumi.

Epilog

Sebagai jalan menuju Indonesia maju dalam bidang politik luar negeri, diplomasi yang membumi merupakan kebijakan yang realistis. Kebijakan tersebut selain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia juga merupakan strategi yang jitu dalam menghadapi perkembangan hubungan internasional masa kini. Kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan yang tepat.

Menggenapi kebijakan tersebut, terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam implementasi. Ketiga hal itu adalah ASEAN, konsep poros maritim dunia, dan konsep Indo-Pasifik. Masing-masing diuraikan berikut ini.

Pertama, tentang ASEAN. Sebagaimana telah dilakukan selama ini, konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan dua kali dalam setahun sangat perlu untuk selalu dihadiri oleh Presiden Jokowi. Dengan kehadiran secara langsung (tidak mewakilkan) maka Presiden bisa rutin berinteraksi dengan kepala pemerintahan negara-negara tetangga. Interaksi semacam itu sangat diperlukan dalam membangun saling pengertian, saling percaya, dan meningkatkan soliditas kerjasama. Di samping itu, dalam rangkaian KTT ASEAN biasa diselenggarakan pertemuan dengan pihak-pihak di luar ASEAN, seperti KTT ASEAN-Cina, KTT ASEAN Plus Three (ASEAN, Cina, Jepang, Korea Selatan), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-Europe Meeting (ASEM), dan sebagainya. Rangkaian pertemuan dengan pihak eksternal itu penting untuk diikuti baik untuk kepentingan ASEAN secara kolektif maupun untuk kepentingan nasional Indonesia.

Telah menjadi kesadaran semua anggota bahwa dengan bersatu dalam ASEAN maka masing-masing negara memperoleh bobot politik (*political leverage*) yang lebih besar ketika berhadapan dengan pihak eksternal ketimbang jika maju secara sendiri-sendiri. Dengan cara seperti itu, semua negara anggota saling mendukung kepentingan setiap negara anggota ASEAN dan pada gilirannya kepentingan bersama ASEAN juga akan mencapai keberhasilan. Di sini terdapat pola hubungan saling memberi dan saling menerima.

Oleh karena itu harus diupayakan agar Presiden Joko Widodo dapat selalu hadir dalam setiap KTT ASEAN.

Pentingnya memberi perhatian lebih besar kepada ASEAN juga didasari fakta bahwa Indonesia merupakan pemimpin ASEAN. Secara formal organisatoris posisi ketua ASEAN memang diduduki secara bergiliran oleh semua negara anggota. Akan tetapi dalam praktek pengelolaan ASEAN dari waktu ke waktu Indonesia selalu diposisikan sebagai "*primus inter pares*" atau *first among equal*. Dengan posisi demikian maka Presiden Indonesia harus bersedia memberi perhatian khusus kepada ASEAN.

Kedua, tentang poros maritim dunia. Hal itu pernah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014. Presiden memaparkan lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim (Indonesia.go.id; 25/02/2019).

Karena hal tersebut disampaikan dalam forum internasional maka wajar jika masyarakat internasional menunggu realisasinya. Tampaknya sampai saat ini kebijakan tentang poros maritim dunia itu oleh pengamat internasional dianggap belum terlalu terlihat kemajuannya. Ben Bland (2020) dalam buku biografi tentang Presiden Joko Widodo antara lain mengemukakan:

"Most of the 'five pillars' of the fulcrum were about domestic policy and the economy: promoting the fishing industry, building maritime infrastructure, and defending Indonesia's sovereignty at a time of intensifying territorial disputes. Jokowi did mention the need

for 'maritime diplomacy' and international cooperation to reduce the risk of conflict in the South China Sea and beyond. But the concept was not fleshed out. And the president rarely spoke about it again, not even mentioning foreign policy or maritime issues in his second-term inauguration speech in 2019" (Bland, 2020: 63).

Dengan mempertimbangkan hal itu maka konsep dan kebijakan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu dipertajam dan diimplementasikan secara lebih intensif. Tujuannya bukan untuk memuaskan para pengkritik yang barangkali tidak sepenuhnya memahami kondisi dan spirit kejiwaan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsep besar yang memang sesuai jati diri bangsa Indonesia itu terlaksana sebaik mungkin sehingga benar-benar bisa membawa ke arah kejayaan bangsa Indonesia.

Ketiga, tentang Indo-Pasifik. Secara harafiah Indo-Pasifik merupakan sebuah wilayah besar sepanjang pantai timur Afrika termasuk sampai negara-negara Teluk, dan mencakup sebagian besar kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan akhirnya Hawaii. Sedangkan secara konotatif, Indo-Pasifik merupakan konsep baru dalam hubungan internasional yang intinya adalah kehendak menjalin kerjasama dalam berbagai bidang di antara negara-negara di kawasan itu. Sejumlah negara telah menawarkan konsep tersebut seperti Jepang, Amerika Serikat, India, termasuk juga Indonesia. Usulan Indonesia adalah konsep yang berdasar pada kerja sama secara terbuka, netral, inklusif, transparan, dan didasarkan pada *habit of dialogue* dengan menjunjung tinggi hukum internasional yang berfokus pada sentralitas ASEAN (www.antaraneews.com; 20/12/2018).

Dalam KTT ke-34 ASEAN telah menyepakati ASEAN outlook on Indo-Pacific. Dalam *outlook* itu kawasan tersebut dipandang sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi, megedepankan dialog dan kerja sama, menitikberatkan pembangunan untuk kesejahteraan, serta menjadikan aspek maritim sebagai elemen tata kawasan (setnas-asean.id; 29/06/2019). Karena Indonesia

merupakan pengusul dan kini usulan tersebut telah menjadi kesepakatan ASEAN, maka wajib bagi Presiden Jokowi untuk memberi perhatian terhadap perkembangan usulan tersebut.

Rujukan

- Antara (2020), "Mendag: Kunjungan Presiden Jokowi ke Australia perkuat perdagangan", <https://www.antaranews.com/berita/1287054/mendag-kunjungan-presiden-jokowi-ke-australia-perkuat-perdagangan>; 10 Februari 2020
- Asmara, Chandra Gian (2020), "Bismillah, Jokowi ke Abu Dhabi Jemput Investasi Rp 126 T" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200112100817-4-129382/bismillah-jokowi-ke-abu-dhabi-jemput-investasi-rp-126-t>; 12 Januari 2020.
- Basith, Abdul (2019), "Diangkat jadi wamenlu, Jokowi berikan tiga tugas ini untuk Mahendra Siregar", <https://nasional.kontan.co.id/news/diangkat-jadi-wamenlu-jokowi-berikan-tiga-tugas-ini-untuk-mahendra-siregar>; 25 Oktober 2019.
- Bland, Ben (2020), *Man of Contradiction, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia*. Australia, Penguin Random House.
- CNN Indonesia (2019), "Indonesia Terpilih Jadi Dewan HAM PBB untuk Kelima Kalinya", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191017230233-106-440552/indonesia-terpilih-jadi-dewan-ham-pbb-untuk-kelima-kalinya>; 17 Oktober 2019.
- Dewi, Herlina Kartika (2020), "Lakukan kunjungan kenegaraan ke Australia, berikut agenda Jokowi", <https://nasional.kontan.co.id/news/lakukan-kunjungan-kenegaraan-ke-australia-berikut-agenda-jokowi>; 09 Februari 2020.
- Helmy, Berlian (2018), "Membangun Kawasan Melalui Konsep Indo-Pasifik Indonesia", <https://www.antaranews.com/>

berita/779616/membangun-kawasan-melalui-konsep-indo-pasifik-indonesia. 20 Desember 2018.

Kementerian Luar Negeri (2015), Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi. Laporan Hasil Penelitian. Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Kementerian Luar Negeri (2019), "Anggota PBB Kembali Percayakan Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB", <https://kemlu.go.id/portal/id/read/693/berita/anggota-pbb-kembali-percayakan-indonesia-menjadi-anggota-dewan-ham-pbb>; 18 Oktober 2019.

Kementerian Luar Negeri (2019), "Presiden Jokowi Ajak Negara ASEAN Konkretkan Implementasi Outlook ASEAN Tentang Indo-Pasifik" <https://kemlu.go.id/portal/id/read/748/berita/presiden-jokowi-ajak-negara-asean-konkretkan-implementasi-outlook-asean-tentang-indo-pasifik>; 3 November 2019,

Kementerian Luar Negeri (2020), "Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Australia Canberra, 8-10 Februari 2020", <https://kemlu.go.id/canberra/id/news/4747/kunjungan-kenegaraan-presiden-ri-ke-australia-canberra-8-10-februari-2020>; 11 Februari 2020.

Kementerian Luar Negeri (2020), "Akhir Presidensi DK PBB, Indonesia Tuai Penghargaan Dunia", <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1638/berita/akhiri-presidensi-dk-pbb-indonesia-tuai-penghargaan-dunia>; 1 September 2020.

Kementerian Sekretariat Negara (2019), "Bicara di KTT ke-22 ASEAN - RRT, Presiden Jokowi Puji Perdamaian dan Stabilitas di Kawasan", https://www.setneg.go.id/baca/index/bicara_di_ktt_ke_22_asean_rrt_presiden_jokowi_puji_perdamaian_dan_stabilitas_di_kawasan; 03 November 2019.

Kementerian Sekretariat Negara (2020), "Presiden Jokowi: Indonesia Berperan Penting dalam Pembentukan Masa

- Depan Energi Terbarukan”, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_indonesia_berperan_penting_dalam_pembentukan_energi_masa_depan_terbarukan; 14 Januari 2020.
- Kementerian Sekretariat Negara (2020), “Jelang Satu Abad Indonesia-Australia, Presiden Jokowi: Fokus Pada Peningkatan Kemitraan”, https://setneg.go.id/baca/index/jelang_satu_abad_indonesia_australia_presiden_jokowi_fokus_pada_peningkatan_kemitraan ; 11 Februari 2020.
- Mudassir, Rayfuk (2019), “Jokowi Beri Target Setahun, Ini 3 Tugas Pokok Wamenlu Mahendra Siregar”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191025/15/1163248/jokowi-beri-target-setahun-ini-3-tugas-pokok-wamenlu-mahendra-siregar->; 25 Oktober 2019.
- Portal Informasi Indonesia (2019), “Indonesia Poros Maritim Dunia”, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>; 25 Februari 2019.
- Prasetya, Andhika (2019), “Jokowi Bertolak ke Thailand Hadiri Rangkaian Acara KTT ke-35 ASEAN”, <https://news.detik.com/berita/d-4769359/jokowi-bertolak-ke-thailand-hadiri-rangkaian-acara-ktt-ke-35-asean?single=1>; 2 November 2019.
- Republik Indonesia (2020), Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Sabarudin, Sulthon Sjahril (2016), “Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol.12 No.1.
- Sari, Haryanti Puspa (2019), “Mahendra Siregar, Wamenlu Pilihan Jokowi yang Diberi Tugas Diplomasi Ekonomi”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/14244031/mahendra-siregar-wamenlu-pilihan-jokowi-yang-diberi-tugas-diplomasi-ekonomi?page=all>; 25 Oktober 2019.

Sekretariat Kabinet (2020), "Presiden Jokowi Ajak Negara G20 "Perang" Lawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi Dunia", <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ajak-negara-g20-perang-lawan-covid-19-dan-pelemahan-ekonomi-dunia/>; 26 Maret 2020.

Tempo.co (2020), "Menlu Retno: Lima Tahun Kedepan, Diplomasi Indonesia Fokuskan 4+1", <https://nasional.tempo.co/read/1292969/menlu-retno-lima-tahun-kedepan-diplomasi-indonesia-fokuskan-41/full&view=ok>; 9 Januari 2020.

WEOnline (2020), "Menlu Retno Hadiri Sidang Dewan HAM PBB dan Siap Sampaikan National Statement", <https://www.wartaekonomi.co.id/read273598/menlu-retno-hadiri-sidang-dewan-ham-pbb-dan-siap-sampaikan-national-statement>; 25 Februari 2020.

Widyastuti, Ariyani Yakti (2020), "Bertolak ke Uni Emirat Arab, Jokowi Akan Jemput Investasi Rp 54 T", <https://bisnis.tempo.co/read/1294101/bertolak-ke-uni-emirat-arab-jokowi-akan-jemput-investasi-rp-54-t/full&view=ok>; 12 Januari 2020.